

**PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Oleh

GITA ADELINA SIMAMORA

NPM 2416041088



FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
II.TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Partisipasi Masyarakat	7
2.3 Implementasi kebijakan	8
2.4 Konsep Pengelolaan Sampah	10
2.5 Kerangka Pikir	13
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	15
3.1. Tipe Penelitian.....	15
3.2. Fokus Penelitian.....	16
3.3. Lokasi Penelitian.....	17
3.4. Jenis dan Sumber Data	18
3.5. Teknik Pengumpulan Data	19
3.6. Teknik Analisi Data.....	21
DAFTAR PUSTAKA.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitin Terdahulu	5
Tabel 3. Informan penelitian.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian	14
---	----

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup menjadi isu global yang masih menjadi perhatian serius hingga saat ini. Salah satu permasalahan lingkungan yang paling nyata dan kompleks adalah pengelolaan sampah. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan volume sampah secara signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, pencemaran lingkungan, serta menurunkan kualitas kehidupan.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023), Indonesia menghasilkan sekitar 68 juta ton sampah per tahun, dan sekitar 37% di antaranya belum terkelola dengan baik. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga, yang menunjukkan bahwa persoalan sampah sangat berkaitan erat dengan perilaku dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapannya.

Dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan dapat terlibat langsung dalam upaya pengurangan, pemilahan, pengumpulan, dan pemanfaatan sampah sesuai dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Dengan demikian, pemerintah berperan sebagai fasilitator, sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Namun, meskipun kebijakan tersebut telah diterapkan di berbagai daerah, kenyataannya permasalahan sampah masih menjadi persoalan besar di tingkat lokal, termasuk di Provinsi Lampung. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik

Provinsi Lampung (2023), jumlah timbulan sampah di provinsi ini terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Salah satu daerah dengan produksi sampah tertinggi adalah Kota Bandar Lampung, sebagai ibu kota provinsi yang memiliki tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas urban yang tinggi.

Kota Bandar Lampung setiap harinya menghasilkan sekitar 700–800ton sampah, dengan sebagian besar berasal dari limbah rumah tangga dan aktivitas perdagangan (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2023). Volume sampah yang besar tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penumpukan sampah di beberapa titik kota, bau tidak sedap, pencemaran air dan tanah di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung, hingga rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah berupaya menanggulangi permasalahan tersebut dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, serta melaksanakan berbagai program seperti Bank Sampah, Gerakan Jumat Bersih, dan Kampung Iklim. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, hanya sekitar 35% warga yang melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, dan hanya sebagian kecil yang terlibat aktif dalam kegiatan bank sampah.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Menurut Mardikanto (2014), partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam suatu kegiatan pembangunan yang bersifat sukarela, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun sumber daya. Dengan adanya partisipasi yang baik, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat kebijakan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi permasalahan lingkungan.

Beberapa penelitian sebelumnya menegaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kebijakan pengelolaan sampah.

Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah (2021) di Kota Bandung menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah mampu menurunkan volume sampah rumah tangga secara signifikan. Sementara itu, penelitian oleh Yuliani dan Rahayu (2022) di Kota Yogyakarta menemukan bahwa keberhasilan program bank sampah sangat ditentukan oleh kesadaran dan peran aktif masyarakat.

Fenomena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah juga terjadi di Kota Bandar Lampung. Masih banyak warga yang belum memilah sampah, membuang sampah sembarangan, serta kurang memahami pentingnya pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis peran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung, Dinas Lingkungan Hidup, serta masyarakat dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis menemukan penelitian dengan tema yang sama dari peneliti terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Farida Rahmawati (2021)	<i>Implementasi Program Bank Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Badan Usaha Milik Pekon (BUM Pekon) Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bank sampah belum berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Program bank sampah berpotensi meningkatkan pendapatan BUMDes namun perlu dukungan dan kesadaran masyarakat agar berjalan efektif.

Irma Suryani (2023)	<i>Pengaruh Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bogor (Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018)</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Semakin baik persepsi dan partisipasi masyarakat, semakin efektif pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut.
John L. Tampubolon (tanpa tahun, Universitas Diponegoro)	<i>Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang telah berjalan namun masih menghadapi kendala berupa kurangnya fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Faktor partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan kebijakan tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian sebelumnya memiliki kesamaan fokus pada kajian partisipasi masyarakat dan efektivitas kebijakan pengelolaan lingkungan, khususnya dalam isu pengelolaan sampah dan pengurangan limbah plastik. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan di bidang lingkungan.

Namun, penelitian ini memiliki pembaruan dibandingkan dengan penelitian terdahulu, yaitu dengan menitikberatkan pada peran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini tidak hanya mengukur sejauh mana masyarakat berpartisipasi, tetapi juga mendeskripsikan bentuk, faktor pendorong, dan hambatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat kota. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan kontekstual baru dalam memahami dinamika pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan.

2.2 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu administrasi publik dan pembangunan, karena menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan kebijakan. Secara sederhana, partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, hingga pengawasan terhadap hasil pembangunan yang memengaruhi kehidupan mereka secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Nasdian (2003) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan proses aktif yang muncul dari kesadaran masyarakat sendiri, dipandu oleh nilai dan cara pandang mereka, serta dilaksanakan melalui mekanisme yang memungkinkan kontrol efektif atas keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pandangan ini mempertegas bahwa partisipasi bukanlah sesuatu yang bersifat *top-down*, melainkan *bottom-up*, karena inisiatifnya berasal dari masyarakat itu sendiri.

Mulyadi (2016) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai keterlibatan secara fisik dalam bentuk tenaga, dana, atau materi, tetapi juga mencakup aspek mental, psikologis, dan emosional. Partisipasi tersebut terlihat dari kesediaan masyarakat untuk memberikan dukungan moral, pemikiran, kesadaran, serta rasa memiliki terhadap program atau kebijakan publik yang dilaksanakan. Dengan demikian, partisipasi menjadi indikator penting dari tingkat kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus mencerminkan kualitas hubungan antara negara dan warganya.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat memiliki makna yang luas dan mendalam. Partisipasi bukan hanya tentang “ikut serta” dalam kegiatan yang dilaksanakan pemerintah, melainkan juga tentang bagaimana masyarakat memiliki ruang untuk berinisiatif, mengawasi, dan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan mereka. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, partisipasi masyarakat dipandang sebagai faktor kunci yang memengaruhi efektivitas kebijakan pengelolaan sampah, karena tanpa keterlibatan aktif masyarakat, kebijakan yang dibuat sering kali tidak berjalan sesuai harapan.

2.3 Implementasi kebijakan

Negara sebagai suatu organisasi publik selain mempunyai tujuan yang harus direalisasikan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan perundang-undangan. Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Agustino Leo Ph.D, 2016). Implementasi merupakan suatu proses mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan (Irawan & Simargolang, 2018).

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah, tugas implemetasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktifitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkembang. Tindakan yang dilakukan untuk menguji data dan menempatkan sistem yang dikembangkan dari pemelihan kegiatan (Duadji&Tresiana, 2019). Selanjutnya sebuah implementasi mengacu pada proses untuk menjalankan sebuah konsep baru, rencana atau sebuah aktifitas baru. Berdasarkan penjelasan diatas dapat di ditarik kesimpulan bahwa implementasi adalah suatu cara untuk mengukur apakah suatu

peraturan atau kebijakan dapat berjalan efektif atau tidak. Hasilnya akan ditentukan apakah program tersebut perlu di evaluasi atau tidak (Rahmat, 2017).

Implementasi kebijakan merupakan fase dalam proses pembuatan kebijakan yang mengikuti dalam pengesahan undang-undang. Menurut Ripley dan Franklin (dalam Nugroho, 2009) implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi merujuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Makna implementasi menurut Merilee S. Grindle, proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Tahapan implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya (alam, manusia maupun biaya) dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan (Christianingsih, 2018).

Menurut Matland (2014) implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok dengan pendekatan dari atas (top down) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (bottom-up). Pendekatan top-down merancang suatu kebijakan sebagai aktor sentral dalam sebuah implementasi kebijakan. Sedangkan pendekatan bottomup menekankan pada dua hal yaitu kelompok-kelompok sasaran dan para penyedia layanan dalam implementasi kebijakan. Kesimpulan dari implementasi kebijakan yaitu aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input maupun output yang berguna untuk outcomes bagi masyarakat. Implementasi sebagai upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah.

Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan.

2.4 Konsep Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi yang kompleks. Peningkatan volume sampah tanpa pengelolaan yang baik dapat menimbulkan permasalahan serius seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, banjir, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus dipahami sebagai sistem terpadu yang melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

1. Pengurangan sampah mencakup kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang, dan pemanfaatan kembali.
2. Penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Undang-undang ini menekankan pentingnya penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebagai upaya mengurangi timbulan sampah dari sumbernya serta mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengelolaan.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2021), keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Pemerintah bertugas sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas, sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama di tingkat sumber sampah. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam bentuk kesadaran memilah sampah, partisipasi dalam bank sampah, serta kepedulian terhadap kebersihan lingkungan merupakan indikator penting keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.

Menurut Sudrajat (2020), efektivitas pengelolaan sampah dapat dinilai melalui sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan sejauh mana sistem pengelolaan berjalan secara terpadu antara aspek teknis, kelembagaan, dan sosial. Indikator-indikator tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur administratif, tetapi juga menggambarkan tingkat keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Adapun indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Kelembagaan dan Kebijakan

Indikator ini berkaitan dengan sejauh mana struktur organisasi, regulasi, dan koordinasi antarinstansi mendukung implementasi pengelolaan sampah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam membentuk kelembagaan yang jelas dan tangguh, seperti Dinas Lingkungan Hidup atau unit pengelola sampah di tingkat kelurahan. Selain itu, keberadaan regulasi seperti Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan kebijakan turunan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Efektivitas kelembagaan dapat diukur dari kejelasan pembagian tugas, koordinasi lintas sektor, serta kemampuan birokrasi dalam melibatkan masyarakat sebagai mitra pelaksana kebijakan.

2. Teknis Operasional

Aspek ini menitikberatkan pada bagaimana proses pengelolaan sampah dijalankan secara efisien dan berkelanjutan, mulai dari tahap pemilahan di sumber, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan dan pemrosesan akhir. Menurut KLHK (2021), sistem teknis yang baik tidak hanya ditandai oleh tersedianya sarana fisik seperti armada pengangkut atau TPA, tetapi juga oleh adanya inovasi berbasis masyarakat seperti bank sampah, komposting, dan pemanfaatan teknologi daur ulang. Dengan demikian, keberhasilan teknis operasional tidak hanya ditentukan oleh kinerja pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan mengelola sampah rumah tangga secara mandiri.

3. Pendanaan dan Pembiayaan

Faktor pembiayaan merupakan elemen penting dalam menjamin keberlanjutan program pengelolaan sampah. Dana yang memadai diperlukan untuk pengadaan sarana, perawatan fasilitas, serta pembinaan kepada masyarakat. Menurut Agustina (2022), salah satu tantangan utama pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah adalah ketergantungan pada APBD yang sering kali terbatas. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam sumber pembiayaan seperti kerja sama dengan sektor swasta, penerapan prinsip *polluter pays*, atau sistem retribusi berbasis volume sampah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu mengalokasikan dan memanfaatkan sumber dana secara efektif dan berkeadilan dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah.

4. Peran serta Masyarakat

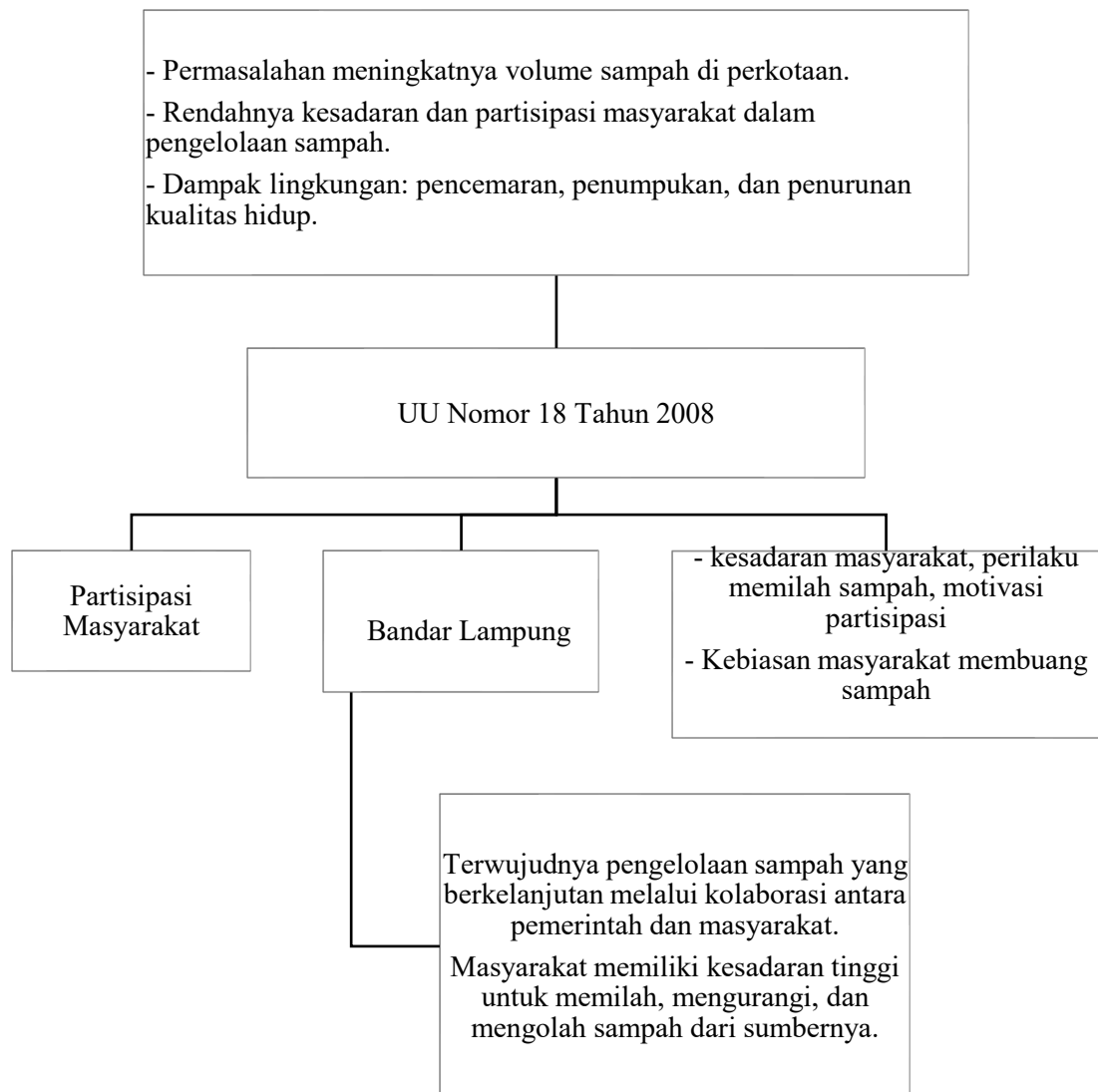
Indikator ini menjadi aspek paling krusial karena menilai tingkat keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah. Menurut Kuncoro (2018), partisipasi masyarakat dapat dilihat dari perilaku memilah sampah dari rumah tangga, keterlibatan dalam kegiatan kebersihan lingkungan, serta partisipasi dalam lembaga berbasis komunitas seperti bank sampah atau kelompok swadaya masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat, maka semakin besar pula peluang keberhasilan kebijakan. Dalam konteks administrasi publik, indikator ini menunjukkan sejauh mana pemerintah mampu mengubah masyarakat dari sekadar objek kebijakan menjadi subjek aktif yang berperan dalam menjaga lingkungan.

Dengan keempat indikator tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas pengelolaan sampah tidak hanya diukur dari keberadaan kebijakan dan sarana fisik, tetapi juga dari keterpaduan antara sistem kelembagaan, dukungan finansial, efisiensi teknis, dan partisipasi masyarakat. Kolaborasi yang baik antarindikator ini akan menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, konsep pengelolaan sampah berlandaskan pada prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dan kolaborasi (*collaboration*) antara pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di daerah seperti Kota Bandar Lampung sangat bergantung pada bagaimana kedua aktor ini menjalankan peran masing-masing secara sinergis pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan penyedia fasilitas, serta masyarakat sebagai subjek aktif yang mendukung pelaksanaan kebijakan melalui partisipasi nyata dalam menjaga kebersihan dan mengurangi sampah dari sumbernya.

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pikir yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka, rumusan, dan tujuan masalah penelitian berfungsi sebagai panduan bagi peneliti. Kerangka ini membantu memastikan bahwa proses penelitian berjalan sesuai rencana dan hasil yang diperoleh selaras dengan tujuan yang diharapkan. Serta, memberikan alur pemikiran yang jelas dan terarah dalam mengumpulkan data.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dikarenakan peneliti ingin menggambarkan dan mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta kejadian secara sistematis dan akurat. Dengan memilih jenis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, maka diharapkan nantinya peneliti dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang peran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif agar dapat menguraikan fenomena lebih dalam, mengumpulkan informasi terdalam, yang dapat menunjukkan kedalaman dan detail dari data yang diteliti. Semakin dalam dan detail menggali data, maka akan semakin jelas pula kualitas penelitiannya (Nurdin & Hartati, 2019). Dalam penelitian kualitatif, pandangan partisipan dikaji melalui strategi interaktif dan juga fleksibel yang bertujuan untuk mendalami fenomena sosial yang sedang berlangsung. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dikarenakan peneliti berharap dapat menghasilkan suatu penjelasan yang mendalam tentang tulisan, ucapan dan perilaku yang diamati dari masyarakat, kelompok, individu, ataupun organisasi tertentu yang dikaji secara mendalam dan menyeluruh. Untuk mendapatkan hasil yang baik, peneliti harus mengumpulkan informasi dan fakta dari berbagai sumber tentang fenomena tersebut lalu menelaah dengan teori yang ada.

3.2. Fokus Penelitian

Spradley dalam (Sugiyono, 2013) mengungkapkan fokus ialah sebuah domain tunggal atau beberapa domain yang ada terkait dengan situasi sosial. Fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh peneliti untuk membatasi penelitian agar tidak meluas ke ruang lingkup yang berbeda. Sehingga peneliti akan lebih fokus ke dalam pengumpulan data yang ini diteliti peneliti.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori Partisipasi Masyarakat yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1977). Fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana peran dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.

Fokus penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung, dengan mengacu pada indikator partisipasi menurut Cohen dan Uphoff, yaitu:
 - a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, bagaimana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan atau penentuan kebijakan terkait pengelolaan sampah.
 - b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan sejauh mana masyarakat terlibat secara langsung dalam kegiatan pengelolaan sampah, seperti pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang.
 - c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, bagaimana masyarakat memperoleh manfaat dari kebijakan pengelolaan sampah, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan.
 - d. Partisipasi dalam evaluasi program, sejauh mana masyarakat ikut berperan dalam menilai keberhasilan atau kekurangan dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung, dengan mengacu pada teori dan hasil penelitian terdahulu, meliputi:

- a. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah.
- b. Dukungan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas dan kebijakan pendukung.
- c. Motivasi dan kepedulian sosial masyarakat terhadap lingkungan.
- d. Komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.
- e. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya lokal yang memengaruhi keterlibatan masyarakat.

3.3. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2007:128), penentuan lokasi penelitian merupakan cara terbaik yang ditempuh dengan mempertimbangkan substansi penelitian serta menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian antara fokus penelitian dan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, faktor geografis dan praktis seperti waktu, biaya, serta tenaga juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah perkotaan yang menghadapi tantangan cukup besar dalam pengelolaan sampah, namun juga memiliki berbagai kebijakan dan program yang melibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya.

Kota Bandar Lampung menjadi menarik untuk diteliti karena pemerintah daerah telah mengupayakan berbagai bentuk kebijakan dan program berbasis partisipasi masyarakat, seperti program bank sampah, pengelolaan sampah berbasis lingkungan, serta kegiatan daur ulang yang dikelola oleh komunitas warga. Melalui berbagai inisiatif tersebut, masyarakat berperan tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaksana aktif dalam mendukung efektivitas kebijakan pengelolaan sampah.

Dengan kondisi tersebut, Kota Bandar Lampung dipandang relevan sebagai lokasi penelitian untuk menggambarkan dan menganalisis peran partisipasi masyarakat

dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, sekaligus untuk melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat dapat mendukung terciptanya tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di tingkat daerah.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk tujuan memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan penelitian. Data survei dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik yang berbeda selama kegiatan survei. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer ialah informasi yang didapatkan peneliti secara langsung dari objek penelitiannya. Data primer diperoleh melalui proses wawancara peneliti dengan narasumber serta pengamatan yang perlu direvisi (Moleong, 2017). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.

Informan utama dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, seperti anggota atau pengurus bank sampah, komunitas peduli lingkungan, serta tokoh masyarakat yang menjadi penggerak dalam kegiatan kebersihan lingkungan di wilayahnya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk, tingkat, serta motivasi partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai sumber informasi tambahan untuk melengkapi data primer. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia sebelumnya dan diperoleh tidak secara langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan dan peraturan daerah terkait pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung, laporan Dinas Lingkungan Hidup,

literatur penelitian terdahulu, data dari situs resmi pemerintah daerah, serta laporan dan dokumentasi kegiatan bank sampah atau komunitas peduli lingkungan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Miles, Huberman dan Saldana (2014) mengenalkan dua model analisis data model alir dan model interaktif. Dalam penelitian ini, digunakan model analisis data interaktif, dengan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara simultan, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian untuk memperoleh gambaran nyata mengenai fenomena yang diteliti. Menurut Moleong (2017), observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang tampak di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung di Kota Bandar Lampung, khususnya di beberapa wilayah yang aktif dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti bank sampah, lingkungan perumahan, dan komunitas peduli lingkungan.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya, dapat dilakukan dengan pedoman atau tanpa pedoman. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki arah pertanyaan, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pandangannya secara bebas.

Dalam penelitian ini, narasumber utama adalah masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung, seperti anggota dan pengurus bank sampah, kader lingkungan, tokoh masyarakat, serta warga yang terlibat dalam program kebersihan dan daur ulang. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara pendukung

dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan program yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Tabel 1. Data Informan

NO	Nama	Jabatan
1	Siti Rohmah	Ketua Bank Sampah “Hijau Berseri”, Kelurahan Sukarame
2	Joko Pranoto	Ketua RT 05, Kelurahan Way Halim
3	Nur Aini	Warga Kelurahan Sukarame
4	Dewi Lestari	Warga Kelurahan Kedamaian
5	Hendra Saputra	Anggota Karang Taruna Way Halim
6	Ir. Fitri Handayani, M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, DLH Kota Bandar Lampung

c. dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai data tertulis, gambar, maupun arsip digital yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumentasi berfungsi sebagai sumber data sekunder yang dapat memperkuat dan melengkapi hasil wawancara serta observasi. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih

objektif mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah serta bentuk partisipasi masyarakat di Kota Bandar Lampung.

Menurut Sugiyono (2022), teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri catatan, arsip, dokumen resmi, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan peristiwa atau kegiatan yang diteliti. Dokumentasi berperan penting sebagai bukti administratif sekaligus sebagai bahan verifikasi terhadap data primer.

Dalam penelitian ini, peneliti menelaah berbagai dokumen resmi pemerintah daerah, seperti laporan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, notulen rapat, surat keputusan, serta hasil evaluasi program pengelolaan sampah. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dokumen berupa peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

3.6. Teknik Analisi Data

Analisis data melibatkan proses pencarian, pencocokan, dan pengorganisasian data ke dalam kategori yang sesuai kedalam kelompok yang lebih kecil, membuat hipotesis, menyusun pola, dan mengevaluasi kebermaknaan data untuk menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh berbagai pihak. (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan objektif sehingga peneliti menggunakan berbagai sumber referensi yang ada untuk mendukung data dalam penelitian ini dan melakukan analisis data. Untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, peneliti menggunakan beberapa tahapan analisis data pada penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut.

1. Kondensasi Data

Alur ini merupakan kegiatan merangkum, meringkas, memilih bagian inti dari penelitian, serta meletakkan fokus pada hal-hal yang dianggap bermakna dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen-

dokumen yang diperoleh. Hasil kondensasi data ini dicapai setelah peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan, kemudian menganalisis transkrip wawancara untuk menemukan fokus penelitian yang relevan.

Dalam penelitian ini, kondensasi data dilakukan terhadap hasil wawancara dengan masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah, pengurus bank sampah, tokoh masyarakat, serta pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Melalui proses kondensasi ini, peneliti berupaya mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.

Kondensasi data penting dilakukan untuk mengatasi jumlah data yang besar, agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mempermudah dalam proses pengumpulan serta analisis data selanjutnya apabila diperlukan.

2. Penyajian Data

Alur ini merupakan sekumpulan data yang tersusun sehingga memungkinkan untuk dapat ditarik kesimpulannya dan dijadikan dasar dalam pengambilan tindakan. Dalam studi ini, data disajikan secara naratif berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, maupun foto kegiatan masyarakat, yang menggambarkan secara jelas bagaimana peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Melalui penyajian data ini, peneliti berusaha menampilkan informasi yang akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan tanpa adanya rekayasa atau penambahan data yang tidak relevan.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan.

Pada bagian ini, peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian (Siyoto & Sodik, 2015).

3.7. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Uji keabsahan data dalam penelitian digunakan untuk mengukur ketepatan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data objek penelitian yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

1. Uji Kredibilitas

Penguatan kredibilitas dalam penelitian kualitatif melibatkan perpanjangan masa penelitian, peningkatan ketekunan, dan penggunaan triangulasi.

a. Perpanjangan Masa Penelitian

Perpanjangan masa penelitian dilakukan apabila peneliti belum memperoleh data yang lengkap dan mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti akan meninjau kembali informasi yang belum sepenuhnya diperoleh dengan menghubungi informan masyarakat, pengurus bank sampah, tokoh lingkungan, serta pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh data terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah benar-benar akurat dan mewakili kondisi lapangan (Sugiyono, 2013).

b. Meningkatkan Ketekunan

Peningkatan ketekunan dilakukan dengan melakukan pengamatan secara cermat dan berulang terhadap kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, seperti pemilahan, pengumpulan, dan kegiatan bank sampah. Dengan ketekunan yang tinggi, peneliti dapat memperoleh data yang konsisten dan menggambarkan situasi secara mendalam serta terstruktur. Selain itu, peneliti juga menambah ketelitian dengan mempelajari referensi dan literatur terkait partisipasi masyarakat dalam kebijakan pengelolaan lingkungan (Sugiyono, 2013).

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengujian kredibilitas data dengan menggabungkan berbagai sumber, waktu, dan teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2013), triangulasi dapat dibedakan menjadi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informasi yang diperoleh dari masyarakat, pengurus bank sampah, serta pihak Dinas Lingkungan Hidup akan dibandingkan dan

dicocokkan untuk melihat kesesuaian antar sumber. Triangulasi dilakukan agar data yang dikumpulkan benar-benar valid dan dapat dipercaya, serta menggambarkan kondisi nyata partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.

2. Uji Transferabilitas

Uji transferabilitas bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada situasi atau konteks lain yang memiliki kesamaan karakteristik. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menyajikan hasil penelitian secara rinci, jelas, dan sistematis, terutama terkait konteks sosial dan lingkungan masyarakat Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, pembaca dapat menilai sendiri apakah hasil penelitian ini dapat digunakan atau dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa (Abdussamad, 2021).

3. Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa proses penelitian telah dilaksanakan secara konsisten dan dapat diaudit. Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji dependabilitas dengan cara mendokumentasikan seluruh proses penelitian, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga analisis dan penarikan kesimpulan. Selain itu, hasil penelitian dibahas bersama dosen pembimbing, serta dilengkapi dengan data mentah, catatan lapangan, pedoman wawancara, dan hasil observasi untuk memastikan konsistensi dalam setiap tahap penelitian (Abdussamad, 2021).

4. Uji Konfirmabilitas

Uji konfirmabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, bukan hasil dari interpretasi atau pandangan subjektif peneliti. Dalam penelitian ini, uji konfirmabilitas dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.

Selain itu, peneliti juga melakukan seminar hasil atau diskusi ilmiah dengan dosen pembimbing dan rekan sejawat untuk mendapatkan masukan serta menghindari bias pribadi. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dibuktikan secara objektif dan mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya (Abdussamad, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Agustina, D. (2022). *Inovasi Pendanaan dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Publik*. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 77–89.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2023). *Provinsi Lampung dalam Angka 2023*. Bandar Lampung: BPS Provinsi Lampung.
- Christianingsih, N. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia: Konsep, Strategi, dan Studi Kasus*. Jakarta: Deepublish.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). *Rural development participation: Concepts and measures for project design, implementation and evaluation*. Ithaca, NY: Cornell University.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. (2023). *Laporan Tahunan Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung Tahun 2023*. Bandar Lampung: DLH Kota Bandar Lampung.
- Duadji, N., & Tresiana, N. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Irawan, B., & Simargolang, E. (2018). *Analisis Implementasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 45–57.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). *Statistik Persampahan Nasional Tahun 2023*. Jakarta: KLHK.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Kinerja Persampahan Nasional Tahun 2021*. Jakarta: KLHK.
- Kristianto, A., & Rosariawari, A. (2023). Penerapan Konsep Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dengan Metode 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace, and Replant) Berbasis Masyarakat di Wilayah Kebraon Kota Surabaya. *Envirous: Journal of Environmental Research*, 2(1), 1–10.
- Kuncoro, A. (2018). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan*. Jurnal Pembangunan Daerah, 6(1), 15–28.
- Mardikanto, T. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Matland, R. E. (2014). *Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity–Conflict Model of Policy Implementation*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), 145–174.
- Merilee S. Grindle. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Miles, Huberman, & Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. Sage Publications.
- Moleong, Lexy. J. (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nasdian, F. T. (2003). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan: Perspektif dan Praktik di Indonesia*. Bogor: Institut Pertanian Bogor Press.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodelogi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendikia.
- Nurhasanah, R. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandung*. Jurnal Administrasi Publik, 9(2), 45–57.

- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. (2015). Bandar Lampung: Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- Rahmat, M. (2017). *Evaluasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi dalam Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahmawati, F. (2021). *Implementasi program bank sampah dalam meningkatkan pendapatan Badan Usaha Milik Pekon (BUM Pekon) Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus* [Skripsi, Universitas Lampung]. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
- Siyoto, S. & Sodik, A. 2015, *Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media Publishing*, Yogyakarta.
- Sudrajat, A. (2020). *Efektivitas Pengelolaan Sampah Perkotaan Berbasis Partisipasi Masyarakat*. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 9(2), 101–115.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, I. (2023). *Pengaruh persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bogor (Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018)* (Skripsi, Universitas Lampung).
- Tampubolon, J. L., & Rostyaningsih, D. (2018). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Jakarta: Sekretariat Negara.

Yuliani, E., & Rahayu, D. (2022). *Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Kota Yogyakarta*. Jurnal Kebijakan Publik, 11(1), 88–99.